

PENGARUH RASIO PERTUMBUHAN, RASIO EFEKTIVITAS, DAN RASIO EFISIENSI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Enggar Kartika Cahyaning¹, Fuadhillah Kirana Putri²

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: enggar.cahyaning@ustjogja.ac.id

ABSTRACT

Purpose: *This study aims to test the influence of growth ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio on social welfare in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).*

Method: *The method used in this study is purposive sampling with the availability of Report on local government finances (LKPD) and audit opinion as the criteria. The sample used is 6 LKPD in DIY each year or 78 total of objects. The data is proceeded by using EViews.*

Finding: *The first hypothesis is that the growth ratio has a significant positive effect on social welfare. The second hypothesis is that the ratio of effectiveness has a significant positive effect on social welfare. The third hypothesis is that the efficiency ratio has a significant positive effect on social welfare. The last hypothesis is that growth ratios, effectiveness ratios, and efficiency ratios have a significant positive effect on social welfare collectively.*

Novelty: *DIY, one of the tourism cities in Indonesia with a low cost of living, is interesting to test the social welfare by using growth ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio.*

Keywords: *growth ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, social welfare*

PENDAHULUAN

Keuangan daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah merupakan alokasi sumber daya daerah dan media yang digunakan untuk mengevaluasi prestasi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah untuk kepentingan publik dan dipertanggungjawabkan sehingga mendorong pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Tuasikal, 2008). Dengan demikian perlu dilakukan analisis kinerja keuangan dengan membandingkan kinerja yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode-periode berikutnya. Rasio pertumbuhan bagus maka kesejahteraan masyarakat juga bagus sehingga menunjukkan semakin bagus kinerja pemerintah daerah dalam mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efektivitas bagus maka kesejahteraan masyarakat juga bagus sehingga menunjukkan semakin bagus kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD. Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Selanjutnya, setiap pendapatan yang berhasil diperoleh oleh pemerintah daerah hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat guna, sesuai dengan prinsip efisiensi keuangan. Pada konteks keuangan daerah, hal ini dapat diukur dengan membandingkan besarnya belanja yang dikeluarkan untuk pembangunan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin tinggi persentase perbandingan belanja terhadap pengeluaran maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah. Pada awal tahun 1990-an Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan nilai indeks pembangunan manusia (Todaro, 2003).

Kinerja keuangan pemerintah daerah pada saat ini belum maksimal, karena masih terdapat daerah-daerah yang mengandalkan keuangan pemerintah pusat, terdapat daerah yang tidak

mampu menggali dan mempertahankan sumber daya daerah, dan masih banyak pengalokasian dana yang digunakan untuk belanja rutin. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang belum maksimal mengakibatkan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina A. Oesi (2013) mengenai Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011), memiliki hasil penelitian dengan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah kota Malang di era otonomi daerah berdasarkan analisis ratio keuangan adalah baik. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kota Malang bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 18,76% (<25%), rasio efektivitas persentase rata-ratanya sebesar 105,4% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil atau sangat efektif, rasio efisiensi Kota Malang prosentase rata-ratanya e dalam memberikan biaya insentif untuk memungut PAD secara maksimal, dan rasio aktivitas Pemerintah Kota Malang di era otonomi daerah menunjukkan pemerintah masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan, serta rasio pertumbuhan Kota Malang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerahnya terlihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami *trend* positif (PAD dan Pendapatan Daerah), meskipun ada juga yang mengalami *trend* negatif (Belanja Daerah).

Rasio pertumbuhan secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah masih rendah, meski setiap tahunnya rasio pertumbuhan selalu meningkat. Terlihat pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan, menunjukkan penerimaan pemerintah daerah semakin baik dan lebih banyak membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat. Semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, hipotesis penelitian terkait hal ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Rasio pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dewa (2010) melakukan penelitian berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum ditemukan evaluasi kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang. Desentralisasi fiskal cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

Rasio Efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nil daerah. Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Efektivitas keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumberpendapatan yang diperlukan daerah dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hipotesis penelitian terkait hal ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dewa (2010) melakukan penelitian berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum ditemukan evaluasi kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain;

ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang. Desentralisasi fiskal cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tuntutan bagi setiap pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pengeluaran maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah. Artinya rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis penelitian terkait hal ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Ni Nyoman, dkk (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap kinerja pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2001-2011. Kesuksesan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah berimplikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, konsumsi per kapita, dan menurunnya angka gini ratio. Hal tersebut berdampak terhadap kondisi kesehatan dan pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat sehingga semakin sejahtera.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal, melalui indikator kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio keuangan yang baik. Semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, hipotesis penelitian terkait hal ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 13 tahun yaitu dari tahun 2001 sampai tahun 2013 yang berjumlah 4 kabupaten, 1 Kota dan 1 Provinsi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling*.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/> yaitu Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi ditambah Pinjaman, Total Belanja Pembangunan, Total APBD, dan Realisasi Penerimaan Pendapatan. Sedangkan data non keuangan diperoleh dari <http://www.bps.go.id/> yaitu data indeks pembangunan manusia daerah DI Yogyakarta.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Pengolahan data menggunakan Eviews 5.1, selain itu juga digunakan software Microsoft Excel sebagai software pembantu dalam mengkonversi data kedalam bentuk baku yang disediakan oleh sumber kedalam bentuk yang lebih representatif untuk digunakan pada software utama dengan tujuan untuk meminimalkan kesalahan data bila dibandingkan dengan pencatatan ulang manual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda, analisis regresi berganda adalah teknik statistik melalui koefisien parameter untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Besarnya nilai masing-masing koefisien regresi tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Dependent Variable: KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Method: Least Squares

Date: 01/15/17 Time: 14:04

Sample: 1 78

Included observations: 78

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.85646	8.013383	8.218309	0.0000
RASIOPERTUMBUHAN	1.877165	2.302753	2.815183	0.0417
RASIOEFEKTIVITAS	9.253799	6.648492	3.391864	0.0168
RASIOEFISIENSI	4.142181	1.973700	5.098688	0.0393
R-squared	0.108732	Mean dependent var		73.27873
Adjusted R-squared	0.072599	S.D. dependent var		8.421265
S.E. of regression	8.109818	Akaike info criterion		7.073948
Sum squared resid	4866.917	Schwarz criterion		7.194805
Log likelihood	271.8840	Hannan-Quinn criter.		7.122329
F-statistic	3.009246	Durbin-Watson stat		1.888143
Prob(F-statistic)	0.035512			

Tabel 1. Hasil Penelitian

Dari tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 65,85646 + 1,877165 X_1 + 9,253799 X_2 + 4,142181 X_3$$

Persamaan model regresi linear berganda diatas, pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 65,85646.
2. Nilai koefisien rasio pertumbuhan diperoleh sebesar 1,877165. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan rasio pertumbuhan sebesar 1% akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 1,877165% dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Nilai koefisien rasio efektivitas diperoleh sebesar 9,253799. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan rasio efektivitas sebesar 1% akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 9,253799% dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Nilai koefisien rasio pertumbuhan diperoleh sebesar 4,142181. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan rasio efisiensi sebesar 1% akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 4,142181% dengan asumsi variabel lain konstan.

Melalui program eviews dapat diestimasi $R^2 = 0,108732$ menandakan bahwa variasi dari perubahan nilai kesejahteraan masyarakat (Y) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel rasio pertumbuhan (X1), rasio efektivitas (X2), dan rasio efisiensi (X3) sebesar 10,87%, sedangkan sisanya sebesar 89,13% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Pengujian secara parsial dari ke-3 variabel bebas tersebut, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu kesejahteraan masyarakat, hal ini ditandai bahwa t-stat untuk koefisien regresi masing-masing variabel bebas

tampak lebih besar dibandingkan t-tabel pada level 5% dan *degree of freedom* sebesar 74. Untuk rasio pertumbuhan (X1) $t\text{-stat} = 2,815183 > t\text{-tabel} (0,05; 74) = 1,99254$ dan variabel rasio efektivitas (X2) $t\text{-stat} = 3,391864 > t\text{-tabel} (0,05; 74) = 1,99254$ variabel rasio efisiensi (X3) $t\text{-stat} = 5,098688 > t\text{-tabel} (0,05 ; 74) = 1,99254$.

Pengujian secara serentak/ bersama-sama dari variabel-variabel diatas menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara F-stat dengan F-tabel. Hasil melalui program eviews diperoleh nilai $F\text{-stat} = 3,009246 > F\text{-tabel} (0,05; 3; 74) = 2,73$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan rasio efisiensi secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan variabel kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis secara keseluruhan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa $F\text{ hitung} > F\text{ tabel} (3,009246 > 2,73)$ dengan nilai signifikansi $0,035512 < 0,05$ yang berarti bahwa rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan rasio efisiensi terhadap kesejahteraan masyarakat secara simultan berpengaruh secara signifikan.

Hasil uji hipotesis secara individu menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Rasio Pertumbuhan (X1) terhadap Kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 2,815183, berarti $t\text{ hitung} > t\text{ tabel} (2,815183 > 1,9921)$, memiliki tingkat signifikansi 0,0417 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 hal ini menunjukkan bahwa variabel rasio pertumbuhan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh Agustina A. Oesi (2013) mengenai Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011), memiliki hasil penelitian dengan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah kota Malang di era otonomi daerah berdasarkan analisis ratio keuangan adalah baik. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kota Malang bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 18,76% (<25%), rasio efektivitas persentase rata-ratanya sebesar 105,4% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil atau sangat efektif, rasio efisiensi Kota Malang prosentase rata-ratanya e dalam memberikan biaya insentif untuk memungut PAD secara maksimal, dan rasio aktivitas Pemerintah Kota Malang di era otonomi daerah menunjukkan pemerintah masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan, serta rasio pertumbuhan Kota Malang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerahnya terlihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami *trend* positif (PAD dan Pendapatan Daerah), meskipun ada juga yang mengalami *trend* negatif (Belanja Daerah).

Rasio pertumbuhan secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah masih rendah, meski setiap tahunnya rasio pertumbuhan selalu meningkat. Terlihat pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan, menunjukkan penerimaan pemerintah daerah semakin baik dan lebih banyak membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat. Semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Hasil pengujian variabel rasio efektivitas (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 3,391864, berarti $t\text{ hitung} > t\text{ tabel} (3,391864 > 1,99254)$, memiliki tingkat signifikansi 0,0168 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 hal ini menunjukkan bahwa variabel Rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Dewa (2010) berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum ditemukan evaluasi kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang. Desentralisasi fiskal cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

Rasio Efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nil daerah. Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Efektifitas keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumberpendapatan yang diperlukan daerah dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya kesejahteraan rakyat.

Hasil pengujian variabel rasio efisiensi (X3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 5,098688, berarti t hitung $>$ t tabel ($5,098688 > 1,99254$), memiliki tingkat signifikansi 0,0393 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 hal ini menunjukkan bahwa variabel Rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Dewa (2010) berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum ditemukan evaluasi kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang. Desentralisasi fiskal cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. efektifitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tuntutan bagi setiap pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pengeluaran maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah. Artinya rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu Rasio pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Hipotesis kedua yaitu rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti Efektifitas keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya kesejahteraan rakyat. Hipotesis ketiga yaitu rasio efisiensi berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tuntutan bagi setiap pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pengeluaran maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pun akan rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya pada peneliti berikutnya supaya penelitian dilakukan lebih dari 1 Provinsi. Dan juga pada peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Andarini, Pris K. 2010. „“Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan””. Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

- Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 4 No.5 October-November 2008 Pp.1119.
- Berutu Dian Anggraeni dan Harto, Puji. " Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), **DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-10** <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> ISSN (Online): 2337-3806.
- Ferdyanto, Dharmawan. 2011. „“ Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)““. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*. Diakses pada bulan Februari 2013 dari <http://google.co.id/>
- Gerbing, M.D.1988.An Empirical Study of taxpayer Perceptions of Fairness.*Unpublished Ph.D. thesis, Univeristy of Texas, Austin*
- George Giligant and G. Richardson. 2005.““ Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hongkong – A Preliminary Study““, *Journal of Financial Crime; Aug 2005; 12, 4; Criminal Justice Periodicals* pg.331.
- Hite, PA., Hasseldine, J., dan Fatemi, DJ.2007.Tax Rate Preferences: Understanding the Effects of Perceived and Actual Current Tax Assesments.*The IRS Research Buletin, Proceedings of the 2007 IRS Research Conference, p.23-50*
- Nunnaly, J.C., 1978, *Psychometric Theory*, New York : McGraw-Hill
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
- Sekaran, Uma (2011), *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, alih bahasa Salemba Empat.